

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah harus terus memperbaiki sistem administrasi pemerintahan baik itu berupa peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel serta bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pada berbagai aspek pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dituangkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. (Meidyah Indreswari, 2011). Salah satu cara yang ditempuh pemerintah dengan menerbitkan dan menyempurnakan perangkat peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan negara/daerah. (Abdul Rohman, 2007)

Sebagai sebuah sistem, pengelolaan anggaran negara telah mengalami banyak perkembangan. Dengan keluarnya tiga paket undang-undang di bidang keuangan, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, sistem pengelolaan anggaran negara di Indonesia terus berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan dinamika manajemen sektor publik.

Pemerintah telah menerapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja, anggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah pada tahun anggaran 2005 dan 2006. Ternyata masih banyak kendala yang dihadapi, terutama

karena belum tersedianya perangkat peraturan pelaksanaan yang memadai, sehingga masih banyak terjadi multi tafsir dalam implementasinya di lapangan. Dalam dekade itu pula telah dikeluarkan berbagai peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, peraturan dirjen dan sebagainya guna menutup kelemahan-kelemahan tersebut. (Sistem Administrasi Keuangan Negara II Pusdiklatwas BPKP, 2007)

Pengelolaan keuangan yang baik pada sebuah unit kerja organisasi dapat dilihat dari pelaporan keuangannya termasuk pada setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaku pengguna anggaran atau pengguna barang. Dalam sebuah laporan keuangan dapat dilihat informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dapat dilakukan oleh SKPD selama satu periode. Laporan keuangan suatu SKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi pemerintahan daerah dan membantu ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk itu pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk memenuhi tautan masyarakat yang mengkehendaki transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Selain itu untuk mendukung pengelolaan keuangan yang terstruktur dan sesuai dengan ketetapan juga dibutuhkan pengelolaan yang baik oleh bendahara selaku pengelola keuangan. Didalam suatu badan usaha seorang bendahara bertugas untuk melakukan pembukuan dan pencatatan aliran keuangan baik berupa uang masuk atau keluar, tetapi bagaimana dengan badan yang dijalankan

oleh pemerintah? Sama kita ketahui badan usaha yang dijalankan oleh pemerintah tidak bergerak dalam pencarian untung tetapi memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba mempelajari tentang penyusunan laporan pertanggung jawaban bendahara di dinas kementerian pekerjaan umum kota padang dengan melakukan kuliah kerja praktek / magang sebagai pengimplementasian teori yang telah di dapat di perkuliahan dan menuangkan dalam bentuk laporan kerja praktek / laporan magang dengan judul **“Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Oleh Bendahara Pengeluaran Pada Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian yang ada di latar belakang masalah, maka perumusan masalahnya adalah apakah penyusunan laporan pertanggung jawaban di kementerian pekerjaan umum balai wilayah sungai sumatera V propinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan peraturan direktur jenderal perbendaharaan nomor Per-47/PB/2009?

### **1.3 Tujuan Magang**

Magang merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Adapun.tujuan magang terbagi dari tujuan umum dan tujuan khusus yaitu sebagai berikut :

#### **a. Tujuan Umum**

Tujuan umum menggambarkan secara umum tujuan dari magang yaitu:

1. Melengkapi SKS sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagai syarat kelulusan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Untuk mempraktekkan teori yang didapat dalam perkuliahan kelapangan (Instansi Pemerintahan) yang sesuai dengan jurusan yaitu Keuangan Negara dan Daerah, Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
3. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi Keuangan Negara dan Daerah, Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
4. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap dunia kerja.
5. Memperkenalkan peserta magang pada dunia kerja sehingga peserta memiliki persepsi, wawasan dan motivasi tinggi terhadap peranannya di masa depan.
6. Terlatih untuk mensosialisasikan diri dengan rekan kerja dalam lingkungan hidup yang lebih luas dan berhadapan dengan berbagai macam karakter kepribadian serta disiplin ilmu yang berbeda.
7. Menyaksikan langsung penerapan ilmu yang telah dipelajari dalam praktek di lapangan.

**b. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan ini yaitu :

1. Untuk dapat mengetahui dan memahami penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara di Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera V.

2. Untuk mengetahui dan memahami pada Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera V.

#### **1.4 Manfaat Magang**

Penelitian ini dapat digunakan dan memberi manfaat untuk pihak pihak sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis

Adapun manfaat magang bagi penulis yaitu :

Menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah sungai Sumatera V.

- b. Bagi Universitas

Terjalannya kerjasama atau hubungan baik antara Universitas dengan dinas/perusahaan tempat magang. Universitas dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja magang dan Universitas juga akan dikenal di dunia industri kerja.

- c. Bagi Tempat Magang

Dapat memberikan Wacana dan masukan yang dapat dipertimbangkan khususnya dalam penyusunan anggaran agar lebih baik pelaksanaannya.

#### **1.5 Tempat dan Waktu Magang**

Penulis berharap selama jangka waktu yang telah ditentukan dapat melakukan kegiatan magang dengan baik dan memuaskan. Penulis juga berharap dapat ditempatkan pada bagian yang sesuai dengan judul laporan magang dan dapat bersosialisasi dengan para pegawai kantor Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V. Dengan

pelaksanaan kegiatan magang ini, diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu, dan pengalaman penulis.

Magang dilaksanakan pada bulan Juni, Juli dan Agustus 2015. Selama pelaksanaan magang penulis dalam teorinya berlangsung selama 40 hari kerja yang telah menjadi ketetapan dari pihak akademik. Selama magang penulis berharap dapat melakukan kegiatan yang sama dengan apa yang dilakukan pegawai-pegawai Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral sumber Daya Air Balai Wilayah sungai sumatera V setiap harinya seperti yang telah menjadi aturannya.

### **1.6 Metode Pengumpulan dan Analisis Data**

#### **a. Metode Pengumpulan**

1. Data primer, diperoleh dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan, dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera V.
2. Data sekunder, diperoleh melalui studi pustaka, dilakukan dengan mempelajari buku, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam laporan ini.

#### **b. Analisis Data**

1. Studi literatur, dengan mempelajari buku-buku dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penulisan laporan magang.
2. Studi dokumentasi, dengan mempelajari undang-undang, peraturan daerah dan keputusan pemerintah lainnya, yang berhubungan dengan penulisan laporan ini.

## 1.7 Sistematika Penulisan

### BAB I : Pendahuluan

Berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan magang, tempat dan waktu magang, tempat dan waktu magang, rencana kegiatan, dan dasar hukum.

### BAB II : Landasan Teori

Mengguraikan tentang apa saja teori yang bersangkutan tentang laporan pertanggungjawaban bendahara.

### BAB III : Gambaran Umum Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat

Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V

Mengguraikan tentang gambaran umum Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V yang mencakup sejarah dan perkembangan, ruang lingkup dari bentuk-bentuk kegiatan serta susunan organisasinya.

### BAB IV : Pembahasan

Penyusunan Laporan pertanggungjawaban oleh Bendahara pada Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V.

### BAB V : Penutup

Berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang berdasarkan pada pemahaman teori serta membandingkan dengan apa yang telah diterapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera V.